

**PELATIHAN PENERAPAN MANAJEMEN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DALAM PROSES PEMBELAJARAN MELALUI METODE BLENDED LEARNING
DI KARAWANG**

**TRAINING ON IMPLEMENTATION OF EDUCATION QUALITY ASSURANCE
MANAGEMENT IN THE LEARNING PROCESS THROUGH BLENDED LEARNING
METHOD IN KARAWANG**

Bambang Ismaya^{1*}, Astuti Darmiyanti², Abduloh³, Ayu Amelia⁴, Selis⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang

*Email : Bambang.ismaya@fkip.unsika.ac.id

Article History:

Received: 20 Agustus 2022

Revised: 02 September 2022

Accepted: 28 September 2022

Keywords: Training,
Education Quality Assurance,
Blended Learning
Process

Abstract: *This training is that the management process for process standards has not been optimally implemented properly, and the standard management of educators and educational staff has not been maximized including many teachers still not mastering the use of Information Technology (IT) as a means of supporting learning. The purpose of this training is to improve the competence of teachers in the learning process using the blended learning method so that the quality of learning becomes quality. This training was held in Karawang. This training refers to the standard of education management which has become the stipulation of the National Education Standards Agency (BSNP) so that it reflects superior and competitive management standards.*

Implementation of the training through the management program for the utilization of educators and education personnel, namely through workshops, in-house training, trainings, implementation of a clear reward and punishment system for teachers, education personnel and students. Supervision and evaluation of education quality management in the learning process through the blended learning method in Karawang is related to inputs such as infrastructure, students, teaching staff, financing and others that are not in accordance with the standards expected to achieve quality education.

The result of this training is how a teacher is able to carry out the learning process using the blended learning method, which is a combination of online and offline learning so as to be able to achieve quality education outcomes

Abstrak

Pelatihan ini adalah Proses pengelolaan untuk standar proses belum optimal dilaksanakan dengan baik, dan pengelolaan standar tenaga pendidik dan kependidikan belum maksimal diantaranya guru masih banyak tidak menguasai dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI) sebagai sarana pendukung pembelajaran. Tujuan Pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para guru dalam proses pembelajaran menggunakan metode blended learning agar kualitas pembelajaran menjadi bermutu. Pelatihan ini diselenggarakan di Karawang. Pelatihan ini mengacu kepada standar pengelolaan pendidikan yang menjadi ketetapan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sehingga mencerminkan standar pengelolaan yang unggul dan berdaya saing.

Pelaksanaan Pelatihan melalui program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu melalui workshop, in house training, pelatihan-pelatihan, penerapan sistem reward and punishment yang jelas bagi Guru, Tenaga Kependidikan dan Siswa. Pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen mutu pendidikan dalam proses pembelajaran melalui metode blended learning di Karawang adalah terkait input seperti sarana prasarana, peserta didik, tenaga pendidik, pembiayaan dan lain-lainnya belum sesuai dengan standar yang diharapkan untuk mencapai kualitas pendidikan.

Hasil dari pelatihan ini bagaimana seorang guru mampu melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan metode blended learning yaitu perpaduan antara pembelajaran daring dan luring sehingga mampu mencapai luaran mutu pendidikan menjadi bermutu.

Kata Kunci: Pelatihan, Penjaminan Mutu Pendidikan, Proses Pembelajaran blended learning

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan. Itulah yang dimaksud dengan sistem pendidikan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas, 2003). Ini berarti tiga hal yang sangat penting. Pertama, komponen pendidikan, karena sistem pendidikan nasional terdiri dari komponen-komponen, atau bagian-bagian, atau unsur-unsur yang bersama-sama membangun pendidikan nasional. Kedua, terintegrasi secara terpadu, menunjukkan bahwa semua komponen tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, apalagi terpisah-pisah. Bahkan semua komponen tersebut harus bergerak bersama secara sinergis atau terintegrasi. Ketiga, tujuan pendidikan merupakan tujuan yang disepakati bersama, yang akan dicapai oleh seluruh komponen pendidikan (Pohan, 2018).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada ayat 51 disebutkan bahwa peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar dan menengah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis

Sekolah (MPMBS) (Nasional, 2003). MPMBS merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui model manajemen yang memberikan otonomi luas kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan pengambilan keputusan secara partisipatif. melibatkan seluruh warga sekolah (Alia, 2019)

Seiring dengan perubahan zaman yang semakin maju, permasalahan pendidikan yang sangat dirasakan adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Secara nasional, kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan nasional tahun 2020 menunjukkan hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), bahkan ada satuan pendidikan yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) (Distribusi Peringkat – Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, n.d.).

Standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berbeda dengan standar yang diterapkan oleh satuan pendidikan. Standar yang digunakan sebagian besar sekolah masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Pemerintah (Alia, 2019). Akibatnya, kualitas lulusan yang dihasilkan hingga saat ini belum memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesenjangan antara hasil ujian nasional dan hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan adanya permasalahan pada instrumen proses belajar siswa dan metode pengukuran hasil belajar siswa. Proses pembelajaran yang berlangsung diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sehingga proses pembelajaran yang harus dipilih, dikembangkan dan diterapkan secara fleksibel dan bervariasi memenuhi kriteria minimal (Chukwuedo & Chukwuedo Nathaniel, 2020; Raharjo, 2013; Woya, 2019; Zhang & An, 2010)

Pada jalur pendidikan formal, proses pembelajaran lebih banyak terjadi di lingkungan kelas dengan sejumlah peserta didik di bawah bimbingan seorang pendidik. Sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa proses pendidikan yang dilaksanakan dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah seperti kemampuan dalam menilai hasil belajar, perencanaan peningkatan mutu pendidikan, pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan dan kemampuan. untuk mengevaluasi manajemen sekolah dan proses pembelajaran (Elbadiansyah & Putra, 2019). Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan

(SNP) pada satuan pendidikan dasar dan menengah dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak akan meningkat tanpa dibarengi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan penjaminan mutu pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia (abunifa, 2017; Elbadiansyah & Putra, 2019; Kusnandi, 2017; Muhammad, 2014; Ningsih et al., 2020; Sultana, 2021; Untari, 2017). Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di semua lapisan manajemen pendidikan dasar dan menengah, dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendiknas Republik Indonesia, 2016). Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, setiap Satuan Pendidikan di jalur formal dan nonformal berkewajiban menjamin mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Salawane, 2005). Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab setiap komponen dalam satuan pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu sekolah secara keseluruhan, diperlukan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah secara bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu diperlukan program Penyelenggaraan Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen sekolah.

Menurut Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016, penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu mekanisme yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan Mutu (QA) adalah istilah umum yang digunakan sebagai kata lain untuk segala bentuk kegiatan pemantauan, evaluasi atau peninjauan mutu (Mendikbud, 2016). Penjaminan mutu memiliki dua bentuk, yaitu pertama, berupa kegiatan desain proses perbaikan dan pengembangan kualitas berkelanjutan (*continuous quality improvement*), dan kedua berupa budaya mutu (*quality culture*) yang mengandung nilai-nilai yang menjadi keyakinan pemangku kepentingan pendidikan dan prinsip atau asas yang dianut. Stake Holder pendidikan seperti orang tua, masyarakat, pemerintah, dan dunia industri memiliki persepsi kualitas yang berbeda-beda.

Perbedaan persepsi ini mempengaruhi sekolah atau lembaga pendidikan perlu menetapkan standar mutu sebagai acuan dalam mencapai mutu pendidikan. Secara kelembagaan, Sistem Jaminan Mutu Pendidikan (SPMP) diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan fungsi manajemen pendidikan. SPMP dalam kegiatannya menitik beratkan pada peningkatan mutu secara berkesinambungan dengan mengukur dan menilai sistem mutu pendidikan, kinerja lembaga pendidikan, dan mutu program studi. Oleh karena itu, di berbagai negara akreditasi (Akreditasi) dijadikan sebagai salah satu cara atau metode yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu dan manajemen mutu pendidikan. Keseluruhan (Total Quality Management/TQM)

Beberapa kendala yang ditemui dalam Pelatihan Penerapan Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Proses Pembelajaran Di Kabupaten Karawang antara lain: (1) Lemahnya komitmen pelaksana pendidikan dalam hal ini kepala sekoah, guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); (2) Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sekolah yang paham tentang SPMI secara utuh dan benar. (3) Budaya penolakan (resistance) yang kuat terhadap setiap perubahan, termasuk perubahan ke arah perbaikan mutu; (4) sikap dan pendapat bahwa tanggungjawab untuk menjamin, meningkatkan, dan membudidayakan mutu hanya terletak pada pimpinan bukan pada setiap individu yang terlibat dalam penyelenggara pendidikan.

Padahal dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan harus mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing. Di mana siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas:

1. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
2. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah;
3. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;
4. Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan;
5. Penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Oleh karena itu perlu dilakukan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala

kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara sistematis, terencana dan berkelanjutan

METODE

Metode pendekatan program Pengabdian Masyarakat dalam Pelatihan Penerapan Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Proses Pembelajaran Melalui Metode Blended Learning Di Kabupaten Karawang melalui analisis kebutuhan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan peyuluhan, pelatihan dan pendampingan sebagai tindakan partisipatif berbasis komunitas. Kemudian untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan melalui tahapan sebagai berikut :

Tahap 1:

- Teknik Identifikasi Kebutuhan masyarakat dan Kebutuhan potensi sumber daya
- Merancang program Pengabdian Masyarakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat
- Teori dan konsep pemecahan masalah sosial

Tahap 2:

- Implementasi perencanaan program Pengabdian Masyarakat
- Evaluasi Keterampilan dalam meningkatkan Kopotensi Guru yang berada di lingkungan Pendidikan Madrasah Kemenag Kab. Karawang yang masih perlu terus didorong dalam upaya mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas berdaya saing global

Tahap 3

- Rencana tindak lanjut dan pelaporan mengetahui hasil kegiatan keseluruhan melaksanakan tahapan evaluasi

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diimplementasikan melalui tahapan sosialisasi, pendampingan dan evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
2. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah;
3. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan

maupun proses pembelajaran;

4. Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan;
5. Penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
6. Evaluasi terhadap hasil implementasi sistem penjaminan mutu berbasis digital pada lokasi mitra;
7. Menghasilkan sistem penjaminan mutu sekolah berbasis digital di MTs Al-Faridiyah Desa Cibuaya Kecamatan. Cibuaya Kab. Karawang Jawa Barat.

Selain itu terdapat pula pendekatan yang dilakukan dalam berjalannya proses pendampingan sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan kepada pimpinan dan pelaksana sistem penjaminan mutu yang ada lokasi mitra mengenai pentingnya sistem penjaminan mutu berbasis digital;
2. Melakukan observasi dan wawancara mengenai bagaimana keberlangsungan sistem penjaminan mutu yang ada di lokasi mitra;
3. Memberikan masukan terhadap hal-hal yang mungkin perlu ditambahkan atau diperbaiki dari berjalannya sistem penjaminan mutu di lokasi mitra;
4. Menjelaskan sistematika rancangan sistem penjaminan mutu yang akan diintegrasikan dengan menggunakan teknologi digital serta kemudahan yang ditawarkan.

Mendampingi mitra dalam menjalankan sistem penjaminan mutu dalam proses pembelajaran serta dengan sebelumnya memberikan pelatihan-pelatihan guna menunjang terlaksananya sistem penjaminan dalam proses pembelajar dengan baik.

DISKUSI DAN HASIL

Adapun gambaran ipteks yang diharapkan dari kegiatan program Pengabdian Masyarakat dalam Pelatihan Penerapan Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Proses Pembelajaran Melalui Metode Blended Learning Di Kabupaten Karawang adalah meningkatnya kompetensi guru madrasah dan kemandirian masyarakat melalui

pemberdayaan. Target Pengabdian masyarakat ini ;

Para Guru Kab. Karawang Jawa Barat yang masih perlu terus didorong dalam upaya mewujudkan pendidikan yang lebih dalam Penerapan Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Proses Pembelajaran melalui metode blended learning

Komitmen Para Guru di Kab. Karawang Jawa Barat dan lembaga pendidikan secara keseluruhan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas mutu pendidikan dalam proses pembelajaran melalui metode blended learning,

Pola pikir Para Guru Madrasah dilingkungan Kab. Karawang Jawa Barat yang masih belum begitu menyadari bahwa pendidikan peningkatan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode blended learning adalah sebuah investasi bagi masa depan anak, masyarakat, bahkan bangsa dan negara.

Dari kegiatan ini, menghasilkan beberapa kontribusi adalah terciptanya pemahaman tentang makna pendidikan berkualitas mutu pendidikan dalam proses pembelajaran melalui metode blended learning di kalangan guru yang selanjutnya diharapkan tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran yang berkualitas mutu pendidikan dalam proses pembelajaran, terwujudnya komitmen pemerintah setempat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan warga masyarakatnya dan para pemangku kepentingan lain, terbangunnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan strategi dan manajemen komunikasi dalam pengembangan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran

Dalam hal kegiatan yang mereka hasilkan.



Gambar Kegiatan Pelatihan



Gambar Proses Pelatihan pembelejaran blended learning



Gambar Proses Pendampingan Pembelajaran Blended Learning



Publikasi Media Elektronik

KESIMPULAN

Dari kegiatan ini, diharapkan menghasilkan beberapa kontribusi adalah terciptanya pemahaman tentang makna pendidikan berkualitas mutu pendidikan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode blended learning di kalangan guru yang selanjutnya diharapkan tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran menggunakan metode blended learning yang berkualitas mutu pendidikan dalam proses pembelajaran, menggunakan metode blended learning terwujudnya komitmen pemerintah setempat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan warga masyarakatnya dan para pemangku kepentingan lain, terbangunnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan strategi dan manajemen komunikasi dalam pengembangan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran

DAFTAR REFERENSI

- [1] abunifa. (2017). Konsep Dasar dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 1(2).
- [2] Alia, R. (2019). Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (Mpmb) Di Smp Negeri 1 Palembang (2010). Universitas Islam Negeri Raden Fatah.
- [3] Ansar, N. (2018). Talent and Talent Management: Definition and Issues. *IBT Journal of Business Studies*, 14(2). <https://doi.org/10.46745/ilma.jbs.2018.14.02.14>
- [4] Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2). <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- [5] Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8). <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- [6] Chukwuedo, S. O., & Chukwuedo Nathaniel, C. (2020). Teacher Education Policy, Ethics, And Quality Of Graduates: Triad Entities For Remodeling General And Vocational Education And Training. *Švietimas: Politika, Vadyba, Kokybė / Education Policy, Management And Quality*, 12(2). <https://doi.org/10.48127/spvk-epmq/20.12.92>
- [7] Crossman, A. (2020). Purposive Sampling - Definition and Types. In Thoughtco.
- [8] De Vincenzi, A., Garau, A., & Guaglianone, A. (2018). Has the quality of teaching and learning processes improved as a result of the implementation of quality assurance coordinated by the state? *Quality in Higher Education*, 24(1), 55–65. <https://doi.org/10.1080/13538322.2018.1426382>
- [9] Distribusi Peringkat – Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (n.d.). Retrieved March 21, 2022, from https://www.banpt.or.id/direktori/institusi/pencarian_institusi.php
- [10] Elbadiansyah, E., & Putra, M. T. F. (2019). Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam Pencapaian Standar Nasional Pendidikan. *PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)*, 1(1). <https://doi.org/10.30872/plakat.v1i1.2696>
- [11] Fauzi, F. (2019). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). *TARBAWI*, 8(1). <https://doi.org/10.36781/tarbawi.v8i1.3052>
- [12] goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2019). pengertian manajemen, tujuan manajemen. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- [13] Griffin, R. W. (2021). Pengertian, Fungsi, dan Unsur-Unsur Manajemen. *Journal Entrepreneur*.
- [14] Haric, D. P. (2018). Definition: {Management}. In <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/management-37609>.
- [15] Hassani, A., Medvedev, A., Haghighi, P. D., Ling, S., Zaslavsky, A., & Jayaraman, P. P. (2019). Context definition and query language: Conceptual specification, implementation, and evaluation. *Sensors (Switzerland)*, 19(6). <https://doi.org/10.3390/s19061478>

- [16] Kho, B. (2018). Pengertian Manajemen dan Empat Fungsi Dasar Manajemen. *Pengertian Manajemen Dan Empat Fungsi Dasar Manajemen*.
- [17] Kusnandi. (2017). Konsep Dasar dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 1(2).
- [18] Liu, Q., & Liu, L. (2018). Exploring organisational learning in universities' responses to a quality assurance reform: experiences from Ontario, Canada. *Quality in Higher Education*, 24(1). <https://doi.org/10.1080/13538322.2018.1429077>
- [19] Lyytinen, A., Kohtamäki, V., Kivistö, J., Pekkola, E., & Hölttä, S. (2017). Scenarios of quality assurance of stakeholder relationships in Finnish higher education institutions. *Quality in Higher Education*, 23(1). <https://doi.org/10.1080/13538322.2017.1294410>
- [20] Manusia, S. D. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Mengelola Perekrutan, Administrasi, Laporan Kinerja, Pelatihan Internal Dan Rapat Kerja Guru Dan Karyawan*.
- [21] McDowell, L., & Sambell, K. (1999). Fitness for purpose in the assessment of learning: Students as stakeholders. *Quality in Higher Education*, 5(2). <https://doi.org/10.1080/1353832990050202>
- [22] Menteri Pendidikan RI. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. *Produk Hukum*.
- [23] Muhammad, S. (2014). Kepemimpinan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Widya*, 2(3).
- [24] Munir, M. (2018). Keberadaan Total Quality Management Dalam Lembaga Pendidikan (Antara Prinsip Implementasi Dan Pilar Tqm Dalam Pendidikan). *Jurnal Realita*, 16(1).
- [25] My Nguyen, L. T., Tran, T., van Pham, T., Nguyen, T. T., Thu Le, H. T., Phuong Trinh, T. T., & Nghiem, T. T. (2021). Factors affecting successful quality assurance implementation in Vietnamese higher education: A qualitative study. *Qualitative Report*, 26(2), 625–636. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4564>
- [26] Nasional, U. S. P. (2003). Law Of The Republic Of Indonesia Number 20 Year 2003 Concerning National Education Systems. *Acta Pædiatrica*, 20, 6–6. <https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.1982.tb08455.x>
- [27] Nguyen, H. C. (2018). How to fulfil Vietnam's higher education accreditation strategic plan 2017-2020. *International Journal of Educational Organization and Leadership*, 24(3–4). <https://doi.org/10.18848/2329-1656/CGP/v24i03/17-25>
- [28] Nguyen, H. C., & Ta, T. T. H. (2018). Exploring impact of accreditation on higher education in developing countries: a Vietnamese view. *Tertiary Education and Management*, 24(2). <https://doi.org/10.1080/13583883.2017.1406001>
- [29] Ningsih, N. L. A. P., Widari, D. A. P. N., & Artawan, I. M. (2020). Analisa Kepuasan Mahasiswa terhadap Kualitas Pelayanan Pendidikan. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 19(1), 24–29. <https://doi.org/10.22225/we.19.1.1403.24-29>

- [30] Oliver, J. (2013). Pengertian Manajemen Pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- [31] Otani, T. (2017). What is qualitative research? In *Yakugaku Zasshi* (Vol. 137, Issue 6). <https://doi.org/10.1248/yakushi.16-00224-1>
- [32] Pham, H. T. (2018). Impacts of higher education quality accreditation: a case study in Vietnam. *Quality in Higher Education*, 24(2). <https://doi.org/10.1080/13538322.2018.1491787>
- [33] Pohan, S. (2018). Manajemen Sekolah: Wujudkan Guru Profesional. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 14(2). <https://doi.org/10.32939/tarbawi.v14i2.265>
- [34] Raharjo, S. B. (2013). Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2). <https://doi.org/10.21831/pep.v16i2.1129>
- [35] Salawane, H. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang. Panduan Konseling Behavioral Dengan Teknik Self Management Untuk Meningkatkan Kerja Keras Siswa Pengantar.
- [36] Sallis, E. (2014). Total quality management in education: Third edition. In *Total Quality Management in Education: Third Edition*. <https://doi.org/10.4324/9780203417010>
- [37] Sandmaung, M., & Khang, D. B. (2013). Quality expectations in Thai higher education institutions: Multiple stakeholder perspectives. *Quality Assurance in Education*, 21(3). <https://doi.org/10.1108/QAE-11-2012-0044>
- [38] Sultana, R. and. (2021). Kebijakan Pemerintah Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1).
- [39] Syarif, R. (2010). Manajemen sumber daya manusia. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- [40] Untari, T. (2017). Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran. Seminar Nasional Kedua Pendidikan Berkemajuan Dan Menggembirakan.
- [41] Utuka, G. (2011). Demonstrating quality: Evaluation of institutional and programme accreditation in Ghana. *International Journal of Vocational and Technical Education*, 3(8).
- [42] UU Sisdiknas, N. 20. (2003). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Records Management Journal*, 1(2).
- [43] Waasi, N. (2021). Manajemen sumber daya manusia.
- [44] Woya, A. A. (2019). Employability among statistics graduates: Graduates' attributes, competence, and quality of education. *Education Research International*, 2019. <https://doi.org/10.1155/2019/7285491>
- [45] zakky. (2018). pengertian manajemen menurut para ahli secara umum. *Zona Referensi*.
- [46] Zhang, S., & An, N. (2010). Analysis on the Concepts and Theories of the Quality of Graduate Education. *Asian Social Science*, 6(12). <https://doi.org/10.5539/ass.v6n12p86>